

## ABSTRAK

**Arinda Suci Ramadani, 2022.** Evaluasi Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Belanja Modal Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Endang Winarsih dan Pembimbing II Wa Ode Rayyani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem transaksi non tunai belanja Modal Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan Sekretaris Umum, Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo telah menerapkan sistem transaksi non tunai menggunakan aplikasi TNT Bank Sulselbar khususnya CMS dan pemindah bukuan dilakukan sesuai dengan peraturan Bupati Wajo. Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo akan diuntungkan dengan diperkenalkannya sistem transaksi nontunai karena akan lebih mudah melacak penggunaan uang untuk belanja modal, sehingga badan tersebut lebih akuntabel, sehingga tercapai akuntabilitas dan transparansi dengan sistem transaksi non tunai. Dari perspektif prinsip akuntabilitas, keputusan belanja Modal dapat lebih transparan karena aliran uang dapat diamati dengan jelas, membuatnya lebih transparan dan menurunkan kejadian penipuan, terutama korupsi. Selain itu, berkaitan dengan prinsip transparansi karena, ketika belanja Modal diterapkan menggunakan TNT, setiap transaksi dilakukan secara real time, rincian setiap transaksi dicatat, dan setiap transaksi dapat dengan mudah dilacak dan dipantau dengan melihat rekening giro. Jumlah nominal uang yang diterima, dikirim, dan penerima yang dituju semuanya jelas ditunjukkan dengan CMS. Belanja modal pemerintah dapat diimplementasikan dengan jumlah kecurangan yang lebih rendah, khususnya korupsi, dengan menggunakan transaksi nontunai.

**Kata Kunci :** Transaksi Nontunai, Akuntabilitas, Transparansi